

Analisis Semiotika Sosial Halliday pada Simbol dan Fenomena “Peringatan Darurat” di Indonesia

Muhammad Abyan Dafi ¹, Arie Prasetyo ², Yogie Alwatan ³

¹ Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Ilmu Sosial, Universitas Telkom , Indonesia,
mhmdabyandf@telkomuniversity.ac.id

² Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Ilmu Sosial,, Universitas Telkom ,
arieprasetyo@telkomuniversity.ac.id

³ Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Ilmu Sosial,, Universitas Telkom , Indonesia, Email (Institusi)

Abstract

The phenomenon of the “Peringatan Darurat” (Emergency Warning) symbol that emerged in Indonesia in August 2024 reflects a form of public response to a socio-political situation perceived as a threat to democratic principles. This symbol spread widely through social media, especially through collaborative posts on the accounts @narasi.tv, @najwashihab, @matanajwa, and @narasinewsroom, and served as a form of criticism against the Constitutional Court's decision and the revision of the Regional Head Election Law (UU Pilkada), which were considered to undermine the sovereignty of the people. This study aims to analyze the “Peringatan Darurat” symbol using M.A.K. Halliday's social semiotic approach, focusing on three key elements: field of discourse, tenor of discourse, and mode of discourse. The research employed a qualitative method with social semiotic analysis techniques applied to texts uploaded by Narasi media as the main unit of analysis. The results show that the discourse is not limited to legal aspects, but also reflects broader dynamics of power, where decisions made by state institutions have the potential to erode public trust in the existing political system. This study concludes that social media symbols can serve as important tools for shaping public opinion and raising societal awareness.

Keywords: M.A.K. Halliday Social Semiotics, Peringatan Darurat, Political Criticism

Abstrak

Fenomena simbol “Peringatan Darurat” yang muncul di Indonesia pada bulan Agustus 2024 mencerminkan bentuk respons masyarakat terhadap kondisi sosial-politik yang dinilai mengancam prinsip-prinsip demokrasi. Simbol ini menyebar luas melalui media sosial, terutama pada akun kolaborasi @narasi.tv, @najwashihab, @matanajwa, dan @narasinewsroom, dan menjadi bentuk kritik terhadap keputusan MK serta revisi UU Pilkada yang dianggap tidak mencerminkan kedaulatan rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis simbol “Peringatan Darurat” menggunakan pendekatan semiotika sosial M.A.K Halliday, dengan fokus pada tiga elemen utama yaitu, *field of discourse*, *tenor of discourse* dan *mode of discourse*. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik analisis semiotika sosial terhadap teks yang diunggah oleh media Narasi sebagai unit analisis utama. Hasil penelitian bahwa wacana ini tidak sekedar berfokus pada aspek hukum, namun juga mencerminkan dinamika kekuasaan yang lebih luas lagi, di mana keputusan-keputusan yang diambil oleh lembaga negara berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik yang ada. Penelitian ini menyimpulkan bahwa simbol-simbol di media sosial dapat menjadi alat yang penting untuk membentuk pandangan masyarakat serta kesadaran masyarakat.

Kata Kunci : Semiotika Sosial M.A.K Halliday, Peringatan Darurat, Kritik Politik

I. PENDAHULUAN

Fenomena “Peringatan Darurat” pada Agustus 2024 menunjukkan penggunaan media sosial sebagai alat untuk mengungkapkan ketidakpuasan masyarakat terhadap keputusan pemerintah (Stewart et al., 2016). Istilah ini muncul sebagai respons terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai revisi Undang-undang Pilkada (Silalahi, 2023), yang berimplikasi pada prinsip-prinsip dasar demokrasi dan hak konstitusional masyarakat. Keputusan tersebut memicu polemik publik dan aksi demonstrasi di berbagai kota serta di dunia maya, mencerminkan keberanian masyarakat untuk menuntut transparansi dari pemerintah (Mietzner, 2023).

Peringatan Darurat pertama kali diungkapkan oleh kolaborasi akun Instagram @narasi.tv, @najwashihab, @matanajwa, dan @narasinewsroom, yang membagikan gambar simbol Garuda biru dengan tulisan “Peringatan Darurat.” Gambar ini diunggah ulang oleh selebgram, influencer, dan musisi, menjadikannya trending topic di media sosial seperti X, TikTok, dan Instagram. Sejak saat itu, perbincangan tentang fenomena ini semakin ramai, terutama di Instagram, di mana akun @narasi.tv aktif menyoroti “Peringatan Darurat” dan perkembangan aksi demonstrasi di Indonesia pada 22 Agustus 2024.

Fenomena “Peringatan Darurat” di Indonesia merujuk pada situasi krisis yang memungkinkan pemerintah mengambil langkah-langkah khusus demi menjaga keamanan dan stabilitas negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada Presiden dengan persetujuan DPR. Namun, keputusan seperti yang diambil Mahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini menuai kontroversi karena dinilai harus tetap berlandaskan prinsip demokrasi, keadilan, serta menghormati hak-hak rakyat dalam proses politik yang adil dan transparan. Dalam konteks ini, semua kebijakan negara, termasuk keputusan MK dan DPR, wajib mencerminkan kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut konstitusi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan semiotika sosial Halliday untuk menganalisis bagaimana simbol “Peringatan Darurat” dikonstruksikan, disebar, dan dimaknai dalam konteks sosial-politik Indonesia. Dengan tiga elemen utama, field, tenor, dan mode of discourse, penelitian ini menelaah latar sosial-politik simbol, aktor-aktor yang terlibat dalam penyebarannya, serta peran media sosial seperti Instagram sebagai medium utama distribusi makna. Simbol “Peringatan Darurat” tidak hanya dilihat sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai representasi hubungan kekuasaan, struktur sosial, dan bentuk perlawanan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap makna sosial-politik di balik simbol tersebut, serta menjelaskan bagaimana simbol ini mencerminkan respon publik terhadap krisis sosial-politik dan dinamika kekuasaan yang menyertainya, sekaligus menunjukkan peran simbol sebagai sarana kritik sosial dalam ruang digital.

II. TINJAUAN LITERATUR

Simbol

Simbol merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan makna yang lebih kompleks melalui representasi visual, verbal, atau objek tertentu. Menurut Peirce (1931), simbol adalah tanda yang memiliki hubungan arbitrer dengan objek yang diwakilinya, sehingga maknanya bergantung kepada interpretasi masyarakat. Dalam konteks sosial, simbol menjadi alat penting untuk menyampaikan pesan yang kompleks secara efisien dan mendalam.

Simbol sering kali memiliki kekuatan yang besar dalam membentuk identitas kelompok hingga bangsa. Barthes (2012) menjelaskan bahwa simbol mampu menciptakan narasi yang menyatukan individu ke dalam suatu komunitas tertentu. Sebagai contoh, simbol-simbol nasional seperti bendera atau lambang negara berperan penting dalam membangun semangat patriotisme di kalangan warga negara.

Simbol juga memiliki dimensi interpretasi yang mendalam. Simbol dapat memiliki makna yang berbeda tergantung pada konteks penggunaannya, audiens, dan tujuan komunikator (Halliday, 1994). Hal ini menunjukkan bahwa simbol memiliki sifat yang fleksibel dan dinamis dalam komunikasi.

Simbol di Media Sosial

Di dunia modern, simbol tidak hanya terbatas pada objek material namun juga mencakup elemen digital seperti emoji, meme, dan hashtag. Dalam penelitian oleh Duncombe (2019), simbol-simbol digital ini digunakan untuk menyampaikan emosi, opini, dan bahkan untuk mengorganisir gerakan sosial di era media digital. Hal ini menunjukkan bahwa simbol terus berkembang mengikuti perubahan teknologi dan budaya.

Simbol di media sosial juga dapat menciptakan identitas kelompok. Penelitian oleh Marwick & Boyd (2014) menunjukkan bahwa simbol digital sering digunakan oleh komunitas daring untuk memperkuat identitas mereka dan membedakan diri dari kelompok lain. Simbol ini membantu menciptakan rasa kebersamaan di antara anggota komunitas.

Dalam konteks politik, simbol di media sosial sering digunakan untuk memengaruhi opini publik. Menurut penelitian oleh Karpf (2016) simbol seperti slogan atau logo kampanye sering digunakan oleh politisi untuk membangun citra mereka di mata publik. Hal ini menunjukkan bahwa simbol memiliki peran yang sangat krusial dalam komunikasi politik di era digital.

Peringatan Darurat di Indonesia

Fenomena “Peringatan Darurat” yang muncul di Indonesia pada Agustus 2024 menjadi salah satu bukti kritik publik yang sangat mencolok terhadap keputusan-keputusan pemerintah yang kontroversial. Simbol ini meskipun terinspirasi oleh peringatan darurat di Jepang, simbol ini telah diadaptasi oleh masyarakat Indonesia dalam rangka mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap revisi Undang-Undang Pilkada dan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi (Ilhamsyah, 2024). Simbol ini berfungsi tak hanya sebagai tanda peringatan, namun juga sebagai bentuk ekspresi kritik terhadap kebijakan politik atau regulasi yang dianggap mengancam hak-hak konstitusional masyarakat (Saad & Margono, 2021).

Dalam konteks ini, simbol “Peringatan Darurat” di media sosial berfungsi sebagai alat untuk menarik perhatian publik terhadap ketidaksesuaian keputusan MA dan MK, yang dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan dan demokrasi. Penggunaan gambar dengan lambang Garuda berlatar biru, yang dikenal sebagai simbol negara, memberikan kesan bahwa isu ini sangat serius dan memerlukan perhatian khusus dari masyarakat. Hal ini menjadi salah satu contoh konkret bagaimana media sosial dapat digunakan untuk menyuarakan kritik politik secara cepat dan luas (Caroline et al., 2019).

Kritik Publik Melalui Simbol “Peringatan Darurat”

Fenomena simbol “Peringatan Darurat” di Indonesia, yang muncul pada Agustus 2024, dapat dipandang sebagai bentuk kritik sosial yang kuat terhadap kebijakan-kebijakan politik yang dianggap kontroversial. Simbol ini, yang awalnya terinspirasi peringatan darurat Jepang, telah bertransformasi menjadi alat untuk menyuarakan ketidakpuasan terhadap revisi Undang-Undang Pilkada dan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Penelitian oleh Mietzner (2023) menunjukkan bahwa simbol-simbol seperti ini sering kali digunakan untuk menyuarakan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga negara, dan dalam hal ini, simbol tersebut menggambarkan kekhawatiran akan menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia.

Simbol ini memperoleh daya sebar yang luar biasa di media sosial, karena masyarakat menggunakan platform ini untuk kritik terhadap pemerintah. Media sosial memungkinkan individu untuk menyebarkan pesan politik dalam waktu singkat, memperkuat suara publik yang sebelumnya sulit terdengar (Utomo & Irwansyah, 2023). Media sosial memungkinkan individu atau kelompok untuk mengatur dan mengkatalisasi gerakan protes yang lebih terorganisir, serta meningkatkan visibilitas isu-isu yang dianggap penting oleh masyarakat (Aminulloh et al., 2021).

Semiotika Sosial M.A.K Halliday

Menurut Halliday (1994), semiotika sosial menganggap tanda dan simbol tidak hanya sebagai unit linguistik atau representasi visual terpisah, melainkan sebagai bagian integral dari praktik sosial yang lebih luas. Dalam kajian ini, tanda-tanda seperti kata, gambar ataupun suara tidak hanya berfungsi untuk mengkomunikasikan informasi, namun juga untuk membentuk dan dipengaruhi oleh struktur sosial dan hubungan kekuasaan. Pendekatan ini

memperkenalkan konsep bahwa makna tidak hanya tercipta melalui kode linguistik atau visual, namun juga dipengaruhi oleh konteks sosial tempat tanda tersebut diproduksi dan diterima.

Semiotika sosial M.A.K Halliday berfokus pada tiga elemen utama, yaitu Medan Wacana (*Field of discourse*), Pelibat Wacana (*Tenor of discourse*), dan Sarana Wacana (*Mode of discourse*). Setiap elemen ini menggambarkan aspek-aspek penting dari bagaimana makna dapat diciptakan dalam komunikasi sosial.

1. Medan Wacana (*Field of discourse*)
Medan wacana atau *field of discourse* mengacu kepada topik atau aktivitas yang sedang dibicarakan dalam wacana tersebut.
2. Pelibat Wacana (*Tenor of discourse*)
Pelibat wacana atau *tenor of discourse* merujuk kepada aktor-aktor dalam suatu wacana, termasuk siapa yang terlibat, peran mereka, dan hubungan sosial antar mereka.
3. Sarana Wacana (*Mode of discourse*)
Sarana wacana mengacu pada cara atau media komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Sarana ini dapat berupa bahasa verbal, gambar, media sosial, atau bentuk komunikasi lainnya.

Secara keseluruhan, semiotika sosial M.A.K Halliday memberikan alat yang kuat untuk menganalisis bagaimana simbol-simbol dan tanda-tanda digunakan dalam komunikasi untuk menciptakan makna dalam konteks sosial.

Dinasti Politik

Dinasti politik mengacu pada praktik pewarisan kekuasaan politik dalam satu keluarga secara generasi melalui mekanisme demokrasi formal, seperti pemilihan umum. Menurut Romli (2021), fenomena ini dikenal sebagai demokrasi dinastik, di mana kekuasaan berpindah di antara anggota keluarga melalui proses pemilihan yang sah, tetapi tetap mempertahankan dominasi politik dari keluarga tertentu.

Fenomena dinasti politik juga terlihat dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Penelitian oleh Al-Fikri et al. (2023) menunjukkan bahwa meskipun Jokowi bukan berasal dari kalangan elite politik, ia mulai membangun dinasti politik dengan menempatkan anak dan menantunya di posisi-posisi strategis.

Relasi Kekuasaan

Relasi kekuasaan merujuk pada hubungan antara aktor-aktor sosial yang saling memengaruhi dalam proses distribusi dan pelaksanaan kekuasaan. Menurut Foucault (dalam Affandi, 2012), kekuasaan tidak hanya terpusat pada institusi formal, tetapi juga tersebar melalui praktik sosial sehari-hari dan relasi interpersonal. Dalam konteks politik, relasi kekuasaan mencakup bagaimana individu atau kelompok memengaruhi kebijakan, pengambilan keputusan, dan distribusi sumber daya melalui jaringan formal maupun informal.

Relasi kekuasaan ini juga terlihat dalam proses pencalonan anggota keluarga Jokowi dalam berbagai posisi politik strategis, seperti Gibran Rakabuming Raka sebagai Wali Kota Solo dan Bobby Nasution sebagai Wali Kota Medan.

III. METODELOGI PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini menggunakan perspektif kualitatif dengan analisis wacana berdasarkan model semiotika sosial M.A.K. Halliday untuk menganalisis teks dan simbol "Peringatan Darurat" dalam media online, khususnya pemberitaan terkait fenomena di Indonesia pada Agustus 2024. Pendekatan kualitatif bertujuan memahami fenomena sosial secara mendalam, termasuk persepsi, makna, dan dinamika sosial yang muncul (Moleong, 2017).

Analisis semiotika sosial Halliday berfokus pada tiga elemen: Mode of discourse (Sarana Wacana), Tenor of discourse (Pelibat Wacana), dan Field of discourse (Medan Wacana), yang saling berkaitan dalam menginterpretasi teks dan simbol. Penelitian ini menganalisis simbol "Peringatan Darurat" dan bagaimana media membangun wacana serta membentuk persepsi publik mengenai kondisi sosial-politik di Indonesia.

Penelitian ini memilih tiga artikel dari Media Narasi, yang merupakan pelopor dalam mempopulerkan simbol Garuda berlatar biru, untuk menggambarkan situasi darurat, kebebasan berekspresi, dan kritik terhadap keputusan pemerintah. Tiga unggahan yang akan dianalisis berasal dari akun Instagram kolaborasi @narasi.tv, @najwashihab, @matanajwa, dan @narasinewsroom mengenai “Peringatan Darurat”. Hasil penelitian akan berupa data deskriptif yang berorientasi pada analisis makna simbol dan teks dalam konteks sosial-politik Indonesia.

Tabel 1. Unit Analisis Penelitian

Unggahan	Tanggal Publikasi	Pengunggah
	22 Agustus 2024	Kolaborasi @narasi.tv, @najwashihab, @matanajwa, dan @narasinewsroom
	22 Agustus 2024	Kolaborasi @narasi.tv, @najwashihab, @matanajwa, dan @narasinewsroom
	22 Agustus 2024	Laman Resmi Media Narasi

Sumber : Olahan Peneliti (2024)

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena “peringatan darurat” di Indonesia mencerminkan kondisi darurat demokrasi akibat tindakan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Pengabaian terhadap keputusan MK mengenai ambang batas pencalonan dan batas usia calon kepala daerah dianggap sebagai ancaman serius terhadap prinsip-prinsip demokrasi.

Melalui analisis semiotika sosial M.A.K. Halliday, ditemukan bahwa wacana ini tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga mencerminkan dinamika kekuasaan yang lebih luas, di mana keputusan lembaga negara berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik. Berita dari Narasi menyoroti tindakan

pemerintah dan DPR yang mengabaikan putusan MK, menciptakan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat terhadap institusi negara.

Penelitian ini menemukan bahwa teks-teks yang diunggah oleh Narasi membentuk konstruksi yang jelas memperlihatkan krisis demokrasi akibat konsolidasi kekuasaan keluarga Presiden Joko Widodo. Melalui kajian terhadap field, tenor, dan mode of discourse, teks tersebut menggunakan diksi, majas, dan struktur naratif yang persuasif untuk menyampaikan kritik terhadap praktik politik dinasti dan pembangkangan terhadap putusan MK. Penggunaan bahasa berperan aktif dalam membentuk opini publik dan mendorong resistensi terhadap ketimpangan kekuasaan, dengan seluruh elemen teks menunjukkan relasi kuasa yang erat antar aktor politik dalam narasi kedaruratan demokrasi.

1). Analisis Teks “Rentetan Kekuasaan Dalam 1 Periode & Mengapa Perlu Menjaga Demokrasi”

Tabel 2. Contoh tabel

<i>Field of discourse</i> (Medan Wacana)	<i>Tenor of discourse</i> (Pelibat Wacana)	<i>Mode of discourse</i> (Sarana Wacana)
Teks ini menunjukkan bagaimana bahasa digunakan untuk menyusun narasi politik yang kaya makna dan kepentingan. Dalam konteks wacana, tindakan seperti "diambil" dan "menyepakati" tidak hanya mencerminkan aktivitas administratif, tetapi juga dinamika kekuasaan yang lebih luas. Kata-kata tersebut menegaskan bahwa keputusan politik merupakan hasil negosiasi dan tekanan dari kelompok tertentu, bukan sekadar deliberasi netral. Partisipasi dalam wacana ini dihadirkan sebagai individu yang mampu mengubah arah politik. Penggunaan frasa seperti "darurat" dan "rawan" membingkai kondisi demokrasi Indonesia dalam krisis, menunjukkan adanya intensi ideologis untuk menyoroti keretakan sistem demokrasi. Tujuan jangka pendek teks ini adalah menyampaikan informasi mendesak dan menggiring opini publik dengan diksi yang menciptakan suasana genting. Sementara itu, tujuan jangka panjangnya adalah membangun narasi tentang keberulangan sejarah kekuasaan di Indonesia, mengajak pembaca menyadari pola kekuasaan yang memperkuat oligarki dan mempersempit ruang demokrasi.	Pelibat wacana dalam teks ini terkait erat dengan struktur kekuasaan di sekitar Presiden Joko Widodo, yang membentuk politik dinasti melalui penempatan anggota keluarga dan orang terdekatnya dalam pemerintahan. Joko Widodo berfungsi sebagai pusat kekuasaan yang memfasilitasi kemunculan Kaesang, Gibran, dan Bobby ke arena politik melalui perubahan regulasi dan dukungan partai. Aktor seperti Anwar dan Supratman juga memperkuat legitimasi hukum dan kebijakan yang mendukung. Status sosial mereka sebagai keluarga, pejabat, dan tokoh legislatif menciptakan relasi dekat secara struktural dan personal, membentuk koalisi kepentingan yang saling mendukung dan mengaburkan batas antara kekuasaan trias politica dalam kontestasi politik di Indonesia.	Wacana politik yang dianalisis berasal dari narasi Najwa Shihab, yang memanfaatkan berbagai perangkat bahasa dan simbol untuk membentuk opini publik serta mengkritik situasi demokrasi di Indonesia. Penggunaan majas seperti eufemisme, apofasis, tautologi, aptronym, dan kontradiksi minus menunjukkan strategi retorik yang kuat dalam membingkai persoalan politik secara halus namun tajam. Pemilihan frasa dan struktur kalimat mencerminkan upaya narator untuk menekankan urgensi dan dampak tindakan aktor politik tertentu. Teks ini disampaikan dalam bentuk monologis, menggunakan medium tulisan dan isyarat visual, termasuk simbol “Peringatan Darurat” yang mengadopsi estetika sistem peringatan bencana. Saluran komunikasi yang digunakan, seperti grafis dan visual, menegaskan bahwa narasi ini bukan sekadar laporan, melainkan peringatan mendesak tentang kondisi sosial dan politik. Modus retorik persuasif menunjukkan bahwa teks ini tidak netral, tetapi bertujuan untuk menggerakkan opini dan mendorong aksi, menjadikannya intervensi terhadap dinamika demokrasi di Indonesia.

Sumber : Olahan Peneliti (2025)

Teks berjudul “Rentetan Kekuasaan Dalam 1 Periode & Mengapa Perlu Menjaga Demokrasi” membentuk wacana darurat demokrasi melalui bahasa yang kaya makna ideologis dan politis. Tindakan seperti “diambil” dan “menyepakati” tidak hanya mencerminkan proses administratif, tetapi juga menunjukkan dominasi kekuasaan dalam pengambilan keputusan politik. Frasa “darurat” dan “rawan” menegaskan bahwa demokrasi Indonesia sedang dalam krisis serius, serta membangun narasi tentang bahaya politik dinasti dan degradasi sistem demokrasi. Aktor politik seperti Joko Widodo dan keluarganya diposisikan sebagai pusat kekuasaan yang membuka jalan bagi Kaesang Pangarep, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution ke pemerintahan, didukung oleh tokoh seperti Anwar Usman dan Supratman Andi Agtas. Wacana ini mencerminkan koalisi kekuasaan yang melanggengkan dinasti politik. Teks disusun secara monologis dengan medium tulisan dan visual, serta simbol peringatan darurat yang mirip dengan sistem peringatan bencana. Modus retorik persuasif, melalui majas eufemisme, apofasis, dan kontradiksi minus, memperkuat posisi teks sebagai bentuk intervensi.

2). Analisis Teks “Peringatan Darurat Catatan Najwa”

Tabel 3. Tabel Analisis Teks “Peringatan Darurat Catatan Najwa”

<i>Field of discourse</i> (Medan Wacana)	<i>Tenor of discourse</i> (Pelibat Wacana)	<i>Mode of discourse</i> (Sarana Wacana)
Teks tersebut secara strategis membentuk wacana yang merepresentasikan krisis demokrasi melalui bahasa yang emosional. Melalui analisis ini, terdapat frasa-frasa yang digunakan untuk menyoroti ketimpangan dalam proses legislasi serta manipulasi kekuasaan yang dilakukan oleh lembaga negara seperti DPR dan Presiden. Proses hukum digambarkan sebagai instrumen kekuasaan yang dapat dibelokkan demi kepentingan elit. Teks ini tak hanya menyampaikan informasi, namun secara aktif menggiring opini publik dan mengajak pembaca untuk terlibat terhadap dinamika politik. Teks ini membangun urgensi dan seruan moral, agar masyarakat tidak bersikap pasif. Dalam tujuan jangka panjang, teks ini bertujuan menanamkan kesadaran terhadap bahaya normalisasi pelanggaran konstitusi, menginspirasi perlawanan rakyat dan mengusik sistem kekuasaan yang minim transparansi.	Teks tersebut memposisikan aktor-aktor utama, yaitu Joko Widodo dan Kaesang Pangarep yang digambarkan memiliki peran strategis dalam dinamika perubahan kebijakan politik, namun tindakannya dinarasikan bertentangan dengan prinsip konstitusional. Sementara itu, Kaesang tampil sebagai individu yang mendapatkan keuntungan dari kebijakan sembrono tersebut, dengan status sosial yang diperkuat oleh intensitas keluarganya. Hubungan antara keduanya tidak hanya bersifat hubungan keluarga, namun mencerminkan jarak sosial dan politik yang tipis, di mana kekuasaan dan pengaruh dalam keluarga presiden diduga turut mewarnai proses politik yang berlangsung.	Wacana politik yang dianalisis dalam hal ini berasal dari narasi Najwa Shihab, yang menggunakan berbagai perangkat bahasa dan simbol untuk membentuk opini publik serta menyampaikan kritik terhadap situasi demokrasi di Indonesia. Penggunaan majas seperti eufemisme, apofasis, tautologi, apironim dan kontradiksi minus menunjukkan adanya strategi retorik yang kuat dalam membimbing persoalan politik secara halus, namun tajam. Selain itu, pemilihan frasa dan struktur kalimat mencerminkan upaya narator untuk memperjelas urgensi dan dampak dari tindakan aktor politik tertentu. Selain itu, teks ini disampaikan dalam bentuk monologis, menggunakan medium tulisan dan isyarat visual sebagai sarana penyampaian pesan. Medium tersebut memperkuat pesan politik yang ingin disampaikan, ditambah dengan elemen visual seperti simbol “Peringatan Darurat” yang memakai estetika dari sistem peringatan bencana. Saluran komunikasi yang digunakan adalah grafis, visual dan vonis yang berfungsi untuk menegaskan bahwa narasi ini tak sekedar laporan, melainkan bentuk peringatan kondisi sosial dan politik yang mendesak. Modus retorik persuasif memperlihatkan bahwa teks ini tidak netral, namun hadir untuk menggerakkan opini dan mendorong aksi, menjadikan wacana ini sebagai bentuk intervensi terhadap dinamika demokrasi di Indonesia.

Sumber : Olahan Peneliti (2025)

Teks berjudul “Peringatan Darurat Catatan Najwa” membentuk wacana mengenai krisis demokrasi dengan bahasa yang penuh intensi, menimbulkan emosi pada pembaca. Dalam elemen medan wacana, teks ini tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengonstruksikan realitas politik sebagai kondisi darurat yang memerlukan perhatian masyarakat. Frasa seperti “manipulasi kekuasaan”, “pelanggaran konstitusi”, dan “ketimpangan legislasi” menunjukkan bahwa proses hukum telah dilecehkan demi kepentingan elit, menggambarkan lembaga negara sebagai instrumen kekuasaan, bukan penjamin keadilan. Dari elemen pelibat wacana, aktor utama seperti Presiden Joko Widodo dan Kaesang Pangarep dikonstruksikan sebagai pusat dinamika kekuasaan, mengaburkan batas antara kepentingan masyarakat dan keluarga elit politik. Kaesang digambarkan sebagai individu yang meraih keuntungan politik. Teks ini menggunakan majas seperti eufemisme, apofasis, dan kontradiksi minus untuk menyampaikan kritik dengan tajam namun elegan. Disampaikan secara monologis melalui medium tulisan dan visual, simbol “Peringatan Darurat” berfungsi sebagai elemen sentral yang memperkuat suasana krisis, menjadikan teks ini sebagai alat pembentuk opini masyarakat.

3). Analisis Teks “Peringatan Darurat Catatan Najwa”

Tabel 3. Tabel Analisis Teks “Peringatan Darurat Saatnya Rakyat Bergerak”

<i>Field of discourse</i> (Medan Wacana)	<i>Tenor of discourse</i> (Pelibat Wacana)	<i>Mode of discourse</i> (Sarana Wacana)
Teks tersebut membangun konstruksi wacana yang kritis terhadap dinamika politik yang sedang terjadi, dengan menekankan proses perlawanan terhadap hukum, manipulasi kebijakan, serta kondisi demokrasi yang sedang genting. Teks ini mencerminkan adanya konflik antara aktor dalam mempertahankan atau melanggar prinsip demokrasi. Partisipasi dari aktor seperti MK, DPR, pemerintah, dan Kaesang dimaknai secara ideologis guna menunjukkan keberpihakan dan ketimpangan dalam sistem kekuasaan. Dalam teks ini, kondisi yang dihadirkan melalui metafora menggambarkan krisis struktural yang dalam, sementara tujuan jangka pendeknya adalah menyadarkan masyarakat akan urgensi krisis tersebut. Secara keseluruhan, teks ini bertujuan menggiring opini publik untuk menolak politik dinasti dan menyerukan perlawanan melalui aksi demonstrasi, sembari mengkaitkannya dengan memori masa Orde Baru sebagai bentuk kontinuitas perjuangan melawan kekuasaan yang menyimpang.	Teks tersebut menampilkan bahwa terdapat keterkaitan yang erat antara tokoh utama, yaitu Joko Widodo, Kaesang Pangarep, Gibran Rakabuming Raka dan juga Prabowo Subianto. Joko Widodo tampil sebagai aktor sentral, dengan otoritas yang tinggi sebagai Presiden RI, yang kebijakannya dianggap memberikan keuntungan langsung kepada anak-anaknya, yaitu Kaesang dan Gibran, melalui perubahan regulasi pencalonan pejabat publik. Status sosial Kaesang dan Gibran sebagai anak Presiden menampilkan adanya keistimewaan yang diberikan, yang dimana dapat membuka akses kekuasaan bagi keduanya, masing-masing di level daerah dan nasional. Prabowo Subianto, sebagai calon presiden, menjadi bagian dari relasi kuasa yang turut diuntungkan oleh kebijakan tersebut, terkhusus dengan kehadiran Gibran sebagai pasangannya. Kedekatan sosial yang sangat erat antara Joko Widodo dengan anak-anaknya, serta antara Kaesang dan Gibran, menggambarkan adanya praktik politik dinasti yang terepresentasi dalam struktur dan isi wacana publik mengenai kontetasi elektoral di Indonesia.	Teks tersebut menggunakan berbagai perangkat bahasa yang memiliki makna yang kuat untuk memperjelas pesan yang ingin disampaikan. Penggunaan majas seperti apofasis, tautologi dan kontradiksi minus menjadi strategi retorik untuk membangun narasi kritis terhadap kondisi politik yang sedang berlangsung. Apofasis digunakan untuk menyampaikan pesan melalui penolakan, seperti menyinggung ketidakbergunaan demonstrasi untuk kemudian mengeaskan pentingnya aksi tersebut. Tautologi dan kontradiksi minus memperkuat makna dan emosi pembaca dengan pengulangan ide, menggambarkan kekecewaan terhadap sistem yang dianggap manipulatif. Teks ini juga disusun dengan tipe monologis, dan disampaikan melalui media tulisan, yang memungkinkan penyebaran pesan yang mendalam. Dalam penyampaian gagasannya, penulis teks ini menggunakan modus persuasif dan argumentatif secara bersamaan.

Sumber : Olahan Peneliti (2025)

Teks berjudul “Peringatan Darurat, Saatnya Rakyat Bergerak” secara tegas membangun wacana resistensi terhadap dinamika politik yang dianggap menyimpang dari esensi demokrasi. Teks ini menyoroti manipulasi kebijakan, pelanggaran konstitusi, dan pembiaran politik dinasti sebagai bagian dari krisis yang mengancam sistem politik di Indonesia. Selain menjelaskan keadaan, teks ini menggiring opini masyarakat menuju aksi nyata, mengaitkannya dengan memori sejarah perlawanan terhadap kekuasaan otoriter, seperti pada masa Orde Baru. Joko Widodo diposisikan sebagai tokoh kunci dalam kekuasaan negara, yang melalui keputusan sembrono memberi ruang bagi anaknya, Kaesang Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka, untuk mendapatkan jabatan di pemerintahan dengan cepat. Kehadiran Prabowo Subianto sebagai calon presiden yang berpasangan dengan Gibran juga menunjukkan bagaimana kekuasaan dibangun atas dasar keuntungan politik yang saling menguntungkan, menciptakan struktur kekuasaan eksklusif dan merepresentasikan praktik dinasti politik. Teks ini memanfaatkan berbagai majas, seperti apofasis, tautologi, dan kontradiksi minus, untuk memperkuat pesan dan emosi pembaca. Penyampaian dalam bentuk monolog tulisan dengan modus persuasif dan argumentatif menjadikan teks ini tidak netral, melainkan seruan bagi masyarakat untuk sadar, bersikap, dan bergerak menghadapi ancaman terhadap demokrasi..

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa simbol “Peringatan Darurat” yang dicetuskan oleh media Narasi, yang muncul di media sosial pada Agustus 2024 dan teks yang dibuat oleh media Narasi merupakan bentuk ekspresi masyarakat terhadap situasi sosial-politik yang dianggap mengancam prinsip demokrasi. Simbol ini tidak sekedar berperan sebagai bentuk visualisasi kritik terhadap keputusan MK dan revisi UU Pilkada, namun juga membangun wacana solidaritas serta kesadaran politik publik di era digital. Melalui pendekatan semiotika sosial M.A.K Halliday, ditemukan bahwa simbol ini mengandung medan wacana yang berupa konteks demokrasi krisis, pelibat wacana dari kalangan pemerintahan dan Presiden yang berupaya melanggengkan dinasti politik di Indonesia, serta sarana wacana yang difasilitasi oleh penggunaan diksi, metafora, dan sajak yang kuat.

Penelitian ini menganalisis tiga unggahan dari Media Narasi. Hasilnya menunjukkan bahwa simbol dan teks yang dibuat membentuk wacana kedaruratan demokrasi, melalui pemilihan diksi seperti “darurat”, “krisis”, dan “melawan” yang secara eksplisit menggambarkan keresahan masyarakat. Aktor yang terlibat dalam wacana seperti Presiden Joko Widodo dan anggota keluarganya, dikonstruksikan sebagai pemegang kekuasaan yang mempersempit ruang demokrasi.

Dengan demikian, simbol “Peringatan Darurat” dan teks yang dibuat oleh media Narasi dapat menjadi refleksi dari dinamika relasi kekuasaan antara negara dan masyarakat di era komunikasi digital. Simbol ini tidak hanya sebagai bentuk kritik pasif, namun juga media resistensi yang menandai pergeseran cara masyarakat membangun kesadaran politik melalui media sosial. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan semiotika sosial M.A.K Halliday efektif digunakan untuk memahami konstruksi makna sosial-politik dalam media digital.

Saran

Secara praktis, media dan pengelola akun media sosial berbasis jurnalistik disarankan untuk tidak hanya menitikberatkan perhatian pada visualisasi simbolik semata, melainkan turut menyertakan narasi yang mendalam. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak hanya terpaku pada tampilan visual, tetapi juga memahami substansi dari isu yang disampaikan. Media juga diharapkan dapat aktif dalam mengangkat simbol-simbol sosial yang muncul dari masyarakat sebagai bentuk representasi suara publik. Dalam hal ini, media perlu menjalankan perannya sebagai kontrol sosial, khususnya terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Selain itu, jurnalis digital diharapkan mampu memperkuat literasi media dan informasi melalui produksi konten yang edukatif, inklusif, dan membangun. Konten semacam ini berpotensi mendorong masyarakat untuk lebih kritis dan aktif dalam merespon dinamika sosial-politik yang terjadi di sekitar mereka.

Sementara itu, dari sisi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan awal bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi dalam mengembangkan kajian di bidang komunikasi, terutama yang berkaitan dengan pendekatan semiotika. Penelitian lanjutan disarankan untuk menggabungkan pendekatan semiotika sosial M.A.K. Halliday dengan teori komunikasi lainnya, guna memberikan perspektif yang lebih luas dalam memahami fenomena negara yang kian kompleks. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu mengeksplorasi lebih jauh mengenai bagaimana simbol-simbol digital memiliki peran strategis dalam membentuk kesadaran politik masyarakat, terutama dalam konteks ruang publik digital yang terus berkembang.

REFERENSI

- Aminulloh, A., Artaria, M. D., Surya, Y. W. I., & Zajackowski, K. (2021). The 2019 Indonesian Presidential Election: Propaganda in Post-Truth Era. *Nyimak : Journal of Communication*, 5(1), 6. <https://doi.org/10.31000/nyimak.v5i1.3882>
- Asworo, H. T. (2024). Asal-Usul “Peringatan Darurat” Berlatar Orde Baru 1991, Ini
- Barthes, R. (2012). *Elemen-Elemen Semiotika* (M. Ardiansyah (ed.)).
- Basuki, U., & Setyawan, R. H. (2022). LANGKAH STRATEGIS MENANGKAL HOAX: SUATU PENDEKATAN KEBIJAKAN DAN HUKUM. *Jurnal Hukum*
- Camelia, L. (2024). PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK DI KPUD KOTA PASURUAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013 PERSPEKTIF IMAMAH (STUDI KPUD KOTA Caraka Justitia, 2(1), 1–22.
- Caroline, S. A., Anogreajekti, N., & Saputra, H. S. . (2019). REPRESENTASI PEREMPUAN SEBAGAI SIMBOL PERLAWANAN PADA NOVEL JALAN
- Castells, M. (2013). *Communication Power* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Creswell, J.W. & Poth, C.N. (2018) *Qualitative Inquiry and Research Design Choosing among Five Approaches*. 4th Edition, SAGE Publications, Inc., Thousand Oaks.
- Dahl, Robert Alan. (1991). *Dilemmas of Pluralist Democracy : Autonomy Vs. Control* Yale Studies in Political Science ; 31 (ISBN-9780). Yale University Press
- Diamond, L., & Morlino, L. (2004). The Quality of Democracy: An Overview. *Journal of Democracy*, 15(4), 20–31. <https://doi.org/10.1353/jod.2004.0060>
- Duncombe, C. (2019). *The Politics of Twitter: Emotions and the Power of Social Media*.
- Fakta Sebenarnya. *Kabar24*. <https://kabar24.bisnis.com/read/20240821/15/1793001/asal-usul-peringatan-darurat-berlatar-orde-baru-1991-ini-fakta-sebenarnya>
- Halliday, M. A. . (1978). *Language as a Social Semiotic: The Social Interpretation of Language and Meaning* (Arnold & Edward (ed.)).

- Halliday, M. A. ., & Hassan, R. (1994). Bahasa, Konteks, dan Konteks: Aspek-Aspek Bahasa Dalam Pandangan Semiotik Sosial. Universitas Gadjah Mada.
- Hidayat, M. F., & Ambarsari, R. (2020). Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XIV/2016 dalam Perspektif Hermeneutika Hukum.
- Ilhamsyah, M. R. (2024). Analisis Framing Peringatan Darurat Pada Akun Intagram Narasi.Tv. Sosial dan Ekonomi, 5(2), 209–216. *International Political Sociology*, 13(4), 409–429. <https://doi.org/10.1093/ips/olz013>
- Jo, B. (2024). Arti “Peringatan Darurat” & Asal-Usul Garuda Biru, Terkait Orba? *tirto.id*. <https://tirto.id/makna-peringatan-darurat-garuda-biru-1991-viral-sejarah-gambarnya-g2XF>
- Jusnia, C. (2024). Viral! Video Analog Horror Peringatan Darurat yang Hebohkan Netizen, Kamu Pasti Kaget Setelah Tahu Faktanya! *Jogja Pos ID*. <https://www.jogjapos.id/nasional/107540327/viral-video-analog-horror-peringatan-darurat-yang-hebohkan-netizen-kamu-pasti-kaget-setelah-tahu-faktanya>
- Kornberger, M. (2022). *Strategies for Distributed and Collective Action*. In *Strategies for Distributed and Collective Action*. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198864301.001.0001>
- Kusumaningsih, R. (2024). Peran Media Dalam Mempengaruhi Opini Publik Tentang Hukum Dan Keadilan. 2(1), 27–40. <https://journal.ikmedia.id/index.php/jishum>
- Mietzner, M. (2023). The coalitions presidents make: presidential power and its limits in democratic Indonesia. *Cornell University Press*, 46(2), 1–3. <https://doi.org/10.1080/13510347.2024.2351078>
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Nielsen, J., Eckstein, L., Nicol, D., & Stewart, C. (2021). Integrating Public Participation, Transparency and Accountability Into Governance of Marketing Authorisation for Genome Editing Products. *Frontiers in Political Science*, 3(October), 1–13. <https://doi.org/10.3389/fpos.2021.747838>
- Nur'annafi, Elita, F. M., Rijal, E., & Mulyana, S. (2020). Online Political Communication: Identity, e-representation and Self-presentation on Women's Legislatif Members. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(02), 1726–1737. <https://doi.org/10.37200/ijpr/v24i2/pr200474>
- Nurani Hukum, 3(2), 1. <https://doi.org/10.51825/nhk.v3i2.8573>
- Nurhajati, L., Cyntia, D., & Jakarta, K.-L. (2016). Sikap dan Etika Pengguna Media Sosial dalam Isu Kebebasan Berekspresi. *Indonesia Media Research Awards Summit*, April.
- Saud, M., & Margono, H. (2021). Indonesia's rise in digital democracy and youth's political participation. *Journal of Information Technology and Politics*, 18(4), 443–454. <https://doi.org/10.1080/19331681.2021.1900019>
- Silalahi, W. (2023). Pemberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Saat Tahapan Pemilu Berlangsung. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 5(01), 13–23. <https://doi.org/10.55108/jbk.v5i01.291>
- Stewart, K., Dubow, T., Hofman, J., & Stolk, C. (2016). Social change and public engagement with policy and evidence. *Social change and public engagement with policy and evidence*. <https://doi.org/10.7249/rr1750>
- Supardi, M.-, & Irma, S.-. (2021). Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Melalui Program Pengabdian Masyarakat. *Fajar: Media Komunikasi dan Informasi Pengabdian Kepada Masyarakat*, 20(2), 109–128. <https://doi.org/10.15408/jf.v20i2.20365>
- Utomo, B. S., & Irwansyah, I. (2023). Peran Media Sosial dalam Gerakan Menolak Penundaan Pemilu di Indonesia. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 8(2), 108–128. <https://doi.org/10.35706/jpi.v8i2.10214>

